

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pupuk berperan sebagai pendukung utama dalam mengatasi kekurangan unsur hara di dalam tanah, seperti nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K), serta unsur mikro lainnya. Kekurangan unsur hara tersebut sering terjadi akibat erosi, degradasi tanah, maupun praktik pertanian intensif yang dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, ketersediaan dan penggunaan pupuk bersubsidi yang sesuai dengan kebutuhan lahan menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan produktivitas (Suwahyono, 2011).

Ketersediaan pupuk akan mempengaruhi produksi tanaman budidaya. Hal tersebut menjadi sangat menentukan karena harga pupuk yang semakin mahal. Adanya pupuk bersubsidi maka dapat mengatasi keterbatasan pupuk bagi petani dengan mendapatkan pupuk yang murah. Agar ketersediannya stabil maka perlu pendistribusian yang baik. Pendistribusian pupuk bersubsidi di Indonesia diatur melalui kebijakan pemerintah yang melibatkan beberapa tahapan mulai dari perencanaan kebutuhan melalui sistem *Electronic-Definitive Group Needs Plan* (e-RDKK), alokasi oleh Kementerian Pertanian, penugasan produksi oleh PT Pupuk Indonesia kepada anak usaha dan distributor, hingga penyaluran ke kios resmi dan kelompok tani untuk selanjutnya dibeli oleh petani yang terdaftar sesuai ketentuan e-RDKK dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, bertujuan memastikan pupuk tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga, dan kualitas sesuai prinsip distribusi subsidi pemerintah (Ditjen Pertanian, 2023)

Pada tingkat provinsi seperti Riau, stok dan alokasi pupuk bersubsidi tersedia melalui anak usaha produsen yang ditugaskan sesuai regulasi dan berdasarkan Keputusan Dinas Pertanian setempat seperti yang tercatat pada alokasi pupuk bersubsidi untuk provinsi tersebut, namun dalam pelaksanaannya petani masih mengalami kesulitan mendapatkan pupuk subsidi karena mekanisme distribusi yang kompleks, data e-RDKK belum sepenuhnya akurat, serta adanya permasalahan seperti penyelewengan, keterlambatan pengiriman, dan proses birokrasi panjang di berbagai tingkatan yang menghambat ketersediaan tepat waktu di tingkat petani (Ditjen Pertanian, 2023)

Dasar hukum penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi pemerintah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, serta Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang setiap tahun mengatur alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Selain itu, distribusi pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui sistem e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebagai dasar penetapan petani penerima. Jenis pupuk bersubsidi yang umumnya disediakan pemerintah meliputi: Urea, NPK, NPK Formula Khusus, Pupuk Organik.

Harga pupuk bersubsidi ditetapkan melalui HET yang berlaku secara nasional dan dapat berubah sesuai kebijakan tahun berjalan. Harga tersebut lebih rendah dibanding pupuk non-subsidi karena selisihnya ditanggung oleh pemerintah melalui APBN. Petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi adalah: Petani yang tergabung dalam kelompok tani Terdaftar dalam sistem e-RDKK Memiliki lahan maksimal sesuai ketentuan (umumnya ≤ 2 hektar untuk tanaman

pangan)Mengusahakan komoditas yang ditetapkan pemerintah (seperti padi, jagung, dan kedelai).

Berdasarkan Data e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)Petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi harus terdaftar dalam sistem e-RDKK yang disusun oleh kelompok tani dan diverifikasi oleh penyuluh pertanian serta dinas terkait.Sasaran Penerima Subsidi Pupuk bersubsidi hanya diberikan kepada petani yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki lahan maksimal sesuai ketentuan pemerintah dan tergabung dalam kelompok tani ,sistem distribusi berjenjang distribusi pupuk dilakukan melalui beberapa lini Secara spesifik, mekanisme subsidi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga ketahanan pangan nasional, serta mendorong kesejahteraan petani. Saat ini, pemerintah menyediakan berbagai jenis pupuk bersubsidi—seperti Urea, NPK, dan organik—melalui jalur distribusi resmi yang melibatkan produsen hingga kios pengecer.

Desa Rambah Utama di Kecamatan Rambah Samo merupakan salah satu wilayah pertanian yang aktif dalam kegiatan budidaya padi, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk penelitian mengenai efektivitas mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi dan pengaruhnya terhadap produksi padi. Desa ini memiliki lahan sawah yang cukup luas dan sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, sehingga kebutuhan pupuk bersubsidi sangat penting untuk mendukung produktivitas pertanian. Mekanisme distribusi pupuk di desa ini melibatkan kelompok tani sebagai pengusul kebutuhan pupuk melalui RDKK, kios resmi sebagai titik penyaluran, serta PT Pupuk Indonesia sebagai penyedia utama, sehingga peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana proses pengadaan,

penyaluran, dan pengawasan berlangsung. Selain itu, kondisi geografis, akses jalan, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat desa memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi petani dalam memperoleh pupuk tepat waktu dan tepat jumlah.

Pemilihan Desa Rambah Utama sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Desa ini merupakan salah satu sentra produksi padi di Kecamatan Rambah Samo, sehingga sangat relevan untuk mengkaji efektivitas mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi dan pengaruhnya terhadap produksi padi. Kondisi petani di desa ini juga menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pupuk bersubsidi untuk menjaga produktivitas lahan, sehingga permasalahan terkait keterlambatan distribusi, kelangkaan pupuk, maupun ketidaktepatan sasaran sering muncul setiap musim tanam.

Akses terhadap pupuk bersubsidi di desa ini masih menghadapi berbagai kendala seperti ketersediaan kios resmi yang terbatas, jarak distribusi yang cukup jauh, serta ketidaksesuaian antara kebutuhan di lapangan dengan alokasi yang diterima. Desa Rambah Utama juga memiliki karakteristik sosial ekonomi petani yang beragam, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam menilai bagaimana kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi berjalan pada tingkat tapak. Selain itu, desa ini dipilih karena data dan informasi lapangan lebih mudah diakses, petani serta perangkat desa bersedia memberikan informasi, dan lokasi penelitian relatif terjangkau sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“ANALISIS EFEKTIFITAS MEKANISME PENDISTRIBUSIAN PUPUK**

BERSUBSIDI DI DESA RAMBAH UTAMA KECAMATAN RAMBAH SAMO”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan ketentuan batasan penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo?
2. Bagaimana tingkat efektivitas mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi ditinjau dari ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan jumlah, kemudahan akses, ketersediaan, transparansi, dan pengawasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo
2. Menganalisis tingkat efektivitas mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi ditinjau dari ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan jumlah, kemudahan akses, ketersediaan, transparansi, dan pengawasan

1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1 Manfaat Teoretis:

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian khususnya mengenai mekanisme pendistribusian pupuk subsidi.

- 2 Manfaat Praktis:

- a. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dan kelompok tani untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi sehingga penyalurannya menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
- b. Menjadi acuan bagi penyuluh pertanian dan distributor pupuk dalam memperbaiki sistem pelayanan dan monitoring distribusi pupuk bersubsidi agar dapat mendukung peningkatan produktivitas padi secara optimal.
- c. Memberikan manfaat langsung bagi petani sebagai pengguna pupuk bersubsidi, berupa peningkatan aksesibilitas, kepastian ketersediaan pupuk, serta peningkatan hasil produksi padi sebagai dampak dari distribusi pupuk yang lebih efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Suyudi dan Noormansyah (2023) dengan judul “*Hubungan Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi dengan Penerapannya pada Usahatani Mendong*”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas distribusi pupuk bersubsidi (berdasarkan prinsip tepat harga, jumlah, tempat, waktu) serta hubungannya dengan penerapan pupuk di usahatani mendong. Penelitian ini menggunakan metode survei (sampling acak sederhana) dengan pendekatan deskriptif; analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif serta uji statistik Kendall W dan Korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan variabel distribusi pupuk bersubsidi tergolong efektif (kecuali indikator tepat harga masuk kategori tidak efektif), penerapan pupuk bersubsidi petani tergolong “tepat”, dan terdapat hubungan simultan yang signifikan antara efektivitas distribusi dan penerapan pupuk (dengan korelasi sedang untuk indikator tepat jumlah dan tepat waktu).

Penelitian dari Lilis dkk. (2025) dengan judul “*Efektivitas Pendistribusian Program Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu*”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan indikator 6T (tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu, tempat). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif (metode campuran) dengan sampel kluster (20% kelompok tani per desa) dan teknik analisis data skala Guttman. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas distribusi variatif menurut indikator: tepat mutu (90,15%) dan tepat tempat (83,85%) tergolong sangat efektif, tepat jumlah (77,69%) dan tepat jenis (75,13%) efektif,

tepat waktu (63,85%) efektif, tetapi tepat harga (36,92%) tidak efektif. Indikator tepat harga terganggu oleh tambahan biaya distribusi, sedangkan indikator lain relatif sesuai alokasi.

Penelitian dari Fatika dkk. (2025) dengan judul “*Analisis Efektivitas Distribusi Program Pupuk Bersubsidi di Indonesia*”. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas program pupuk bersubsidi nasional berdasarkan prinsip 7T (tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, mutu). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif campuran (mixed methods), dengan pengumpulan data melalui survei dan wawancara di tujuh provinsi mewakili kondisi berbeda. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan skoring indikator menggunakan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan skor efektivitas rata-rata 3,65/5 (di bawah ambang efektif 75%), menandakan pelaksanaan belum optimal. Masalah utama ditemukan pada validasi penerima subsidi, ketepatan waktu pengiriman, dan transparansi harga. Rekomendasi meliputi penguatan sistem verifikasi petani, monitoring berbasis masyarakat, dan peningkatan pemahaman kebijakan untuk memperbaiki efisiensi penyaluran pupuk bersubsidi.

Penelitian dari Harianto dan Thony (2023) dengan judul “*Analisis Penerapan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Muara Enim*”. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model distribusi pupuk bersubsidi yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan petani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan wawancara mendalam kepada dinas pertanian, distributor, pengecer, penyuluh, dan petani menggunakan teknik informan purposive dan snowball. Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian pupuk bersubsidi di lapangan masih kurang efektif (sering terjadi kelangkaan meski

alokasi E-RDKK telah disalurkan). Petani menilai model distribusi saat ini tidak mendukung kebutuhan mereka. Direkomendasikan model distribusi baru yang lebih langsung (produsen → distributor → kelompok tani → petani tanpa perantara pengecer) untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan HET harga pupuk sesuai ketentuan.

Penelitian dari Sulaiman dkk. (2023) dengan judul “*Keefektifan Distribusi Pupuk Bersubsidi pada Petani di Kabupaten Mempawah*”. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji efektivitas distribusi subsidi pupuk di Kabupaten Mempawah berdasarkan indikator enam tepat. Penelitian ini menggunakan metode survei asosiatif-kausal (data primer melalui wawancara, kuesioner, dan observasi) di Kecamatan Anjongan (lima desa). Teknik analisis meliputi penghitungan persentase efektivitas tiap indikator 6T. Hasil menunjukkan efektivitas distribusi keseluruhan dalam kategori efektif (rata-rata 81,03%). Indikator tertinggi adalah tepat mutu (85,80%), tepat harga (85,37%), tepat jenis (81,90%), tepat jumlah (81,14%), tepat tempat (76,62%), sedangkan tepat waktu memiliki nilai terendah (75,57%). Temuan ini menegaskan secara umum distribusi pupuk bersubsidi di wilayah tersebut telah efektif menurut empat kriteria tepat, namun waktu pengiriman perlu perhatian lebih.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Efektivitas

Efektivitas secara umum merujuk pada sejauh mana suatu tujuan tercapai (*doing the right things*). Efektivitas berbeda dengan efisiensi (*doing things right*); fokus efektivitas pada pencapaian tujuan/target. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur manajemen, manajemen yang efektif dan efisien adalah kunci keberhasilan

organisasi. Pada konteks evaluasi program atau kebijakan publik, efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil sesuai sasaran yang telah ditetapkan (Krisnandi et al., 2019). Artinya, efektivitas program diukur dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan program; program dikatakan efektif bila hasilnya sejalan dengan target yang dirancang (Pramono, 2020).

Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi terhadap standar yang ditetapkan, maka akan dinilai semakin efektif. efektivitas terbagi dalam tiga kategori yaitu (1) efektivitas individu, yang menekankan pada kinerja dan kontribusi setiap anggota organisasi terhadap tujuan yang telah ditetapkan, (2) efektivitas kelompok, yaitu mengukur seberapa baik sekelompok individu bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Efektivitas kelompok mencakup sinergi dan kolaborasi antar anggota tim untuk mencapai hasil yang optimal, (3) efektivitas organisasi, yaitu kontribusi dari efektivitas individu dan kelompok, serta bagaimana semua elemen dalam organisasi bekerja bersama untuk mencapai tujuan strategis (Gibson *et al.*, 2011).

Efektivitas adalah pencapaian target *output* yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya dengan output realisasi atau sesungguhnya, dikatakan efektif jika *output* seharusnya lebih besar daripada output sesungguhnya. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi (Kiwang *et al.*, 2015). Konsep efektivitas berkaitan dengan cara pencapaian tujuan tingkat yang lebih tinggi (misalnya, kelangsungan hidup, profitabilitas, pertumbuhan, reputasi, kondisi kerja yang baik,

pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat). Efektivitas diukur dengan sejauh mana tujuan tersebut tercapai. Efektivitas artinya mengukur sampai tingkat manakah tujuan itu sudah dicapai dalam kuantitas dan kualitas (Astuti, 2023).

Efektivitas adalah sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai suatu kebijakan mampu mewujudkan apa yang memang menjadi targetnya. Tujuan tersebut dapat bersifat sangat luas maupun sangat spesifik, karena terdapat suatu spektrum yang berkesinambungan, mulai dari pencapaian output yang sangat konkret hingga hasil yang bersifat umum. Indikator efektivitas program pada umumnya berfokus pada pengukuran perubahan hasil yang sesuai dengan tujuan program tersebut (Commission, 2013).

Efektivitas dapat dipahami sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai hasil yang diinginkan, dengan mempertimbangkan pentingnya relatif dari tujuan tersebut. Menilai efektivitas memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional, dengan mempertimbangkan berbagai indikator dan pentingnya relatifnya. Efektivitas organisasi dapat dievaluasi berdasarkan beberapa indikator kunci (Wardhana, 2024). Indikator efektivitas menurut Wardhana (2024) adalah sebagai berikut:

1. Relevansi

Relevansi merujuk pada tingkat kesesuaian antara tujuan dan aktivitas organisasi dengan kebutuhan serta harapan para pemangku kepentingan, seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat. Organisasi yang relevan mampu mengidentifikasi kebutuhan tersebut dan menyesuaikan strategi maupun operasionalnya sehingga menghasilkan nilai yang diharapkan.

Relevansi menunjukkan bahwa arah kebijakan dan program yang dijalankan tidak menyimpang dari kebutuhan riil lingkungan eksternal.

2. Efikasi

Efikasi berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian efikasi tidak hanya didasarkan pada hasil akhir, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana target tersebut dapat dicapai melalui strategi yang tepat. Indikator efikasi dapat dilihat melalui capaian kinerja, tingkat keberhasilan program, serta kesesuaian antara target dan realisasi yang diperoleh.

3. Efisiensi

Efisiensi menunjukkan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan. Sumber daya yang dimaksud meliputi waktu, biaya, tenaga kerja, dan material. Organisasi yang efisien mampu menghasilkan output maksimal dengan penggunaan input yang minimal, sehingga dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

4. Keberlanjutan

Keberlanjutan mengacu pada kemampuan organisasi dalam mempertahankan aktivitas dan operasionalnya dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Organisasi yang berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kinerja ekonomi dan tanggung jawab sosial serta lingkungan.

5. Dampak

Dampak merupakan efek atau hasil nyata yang ditimbulkan oleh aktivitas organisasi terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan sekitarnya. Dampak dapat berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, maupun perbaikan kondisi lingkungan. Dimensi ini menjadi indikator penting karena menunjukkan kontribusi nyata organisasi di luar pencapaian internalnya.

2.2.2 Konsep Mekanisme

Mekanisme pada umumnya adalah cara atau tata kerja suatu sistem dalam mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Pada teori organisasi, tujuan tercapai melalui akumulasi sumber daya yang dikendalikan *melalui mekanisme kerja organisasi* yang mencakup, pola kerjasama, aturan, dan prosedur internal suatu lembaga merupakan mekanisme yang menyalurkan sumber daya dan proses hingga mencapai sasaran. Mekanisme formal dalam organisasi ditekankan melalui aturan dan prosedur yang baku. Misalnya, *formalisasi* tugas atau struktur organisasi berlangsung “melalui aturan, prosedur maupun mekanisme kerja yang ditetapkan (Jaelani, 2021)

Mekanisme operasional terwujud dari tata kerja dan struktur formal organisasi. Secara operasional, mekanisme yang baik menghasilkan kinerja yang diharapkan: setiap proses yang dijalankan secara baik oleh seluruh komponen organisasi akan menghasilkan keluaran (*outcome*) sesuai tujuan. Mekanisme internal yang terstandar dan profesional, organisasi dapat menjamin konsistensi hasil dan akuntabilitas pelaksanaan (Tanjung et al., 2021). Mekanisme berfungsi sebagai prosedur atau tata cara yang digunakan untuk mengatur pelaksanaan tugas

dan wewenang agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien (Sugiyanti, 2025).

Mekanisme merupakan prosedur atau tata cara yang digunakan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan wewenang agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien” Pada sistem pemerintahan, mekanisme biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan, standar operasional, dan tata kelola yang mengatur hubungan antar unit kerja (Krisnandi et al., 2019).

2.2.3 Konsep Distribusi

L. Fitriana et al., (2023) menyebutkan bahwa distribusi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menyalurkan, menyebarkan, mengirimkan, serta menyampaikan barang kepada konsumen sehingga diperlukan peran perantara atau penyalur dalam proses. Distribusi merupakan saluran yang digunakan produsen untuk mendistribusikan barang agar dapat di jangkau oleh konsumen. Bagi konsumen, distribusi mempermudah akses dalam memperoleh barang atau jasa sesuai kebutuhan. Selain itu, distribusi juga meningkatkan nilai guna suatu barang, karena produk yang hanya tersimpan di lokasi produksi tidak akan memberikan manfaat apabila tidak didistribusikan kepada masyarakat luas.

Distribusi adalah proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen akhir. Dalam pemasaran, distributor diposisikan sebagai saluran fisik untuk mengirim dan menyampaikan produk kepada pembeli akhir. Sebagai contoh, menurut definisi pemasaran, *saluran distribusi* digunakan “untuk menyajikan, menjual, dan menyerahkan produk secara fisik kepada pembeli melalui distributor, pedagang besar, pengecer, dan agen” (Suryanto, 2016). Proses distribusi merupakan aktivitas

pemasaran yang mampu: 1) menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan utilitas bentuk, tempat, waktu dan kepemilikan, 2) memperlancar arus saluran pemasaran (*marketing channel flow*) secara fisik dan non fisik yang meliputi arus barang fisik, arus kepemilikan, arus informasi, arus promosi, arus negosiasi, arus pembayaran, arus pendanaan, arus penanggungan resiko dan arus pemesanan (Rosmayani, 2021).

Distribusi melibatkan tiga aliran utama: arus produk, arus uang, dan arus informasi sepanjang rantai pasok. Komponen-komponen ini membentuk pola distribusi dimana barang bergerak fisik dari produsen sampai konsumen, didukung oleh arus finansial (pembayaran) dan informasi (pemesanan, pelacakan). Dalam konteks pertanian, distribusi pupuk mengacu pada pengiriman pupuk dari produsen (pabrik pupuk) ke petani. Mekanisme distribusi langsung tersebut, pemerintah dapat mengawasi harga dengan lebih baik dan mempercepat pasokan ke petani (Kartik et al., 2021).

2.2.4 Pupuk Bersubsidi

Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, 2018). Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian. pupuk bersubsidi adalah barang pertanian di bawah pengawasan negara, di mana pemerintah menanggung sebagian harga agar petani mendapatkan pupuk dengan biaya lebih rendah. Kebijakan pupuk bersubsidi dirancang untuk meningkatkan produktivitas petani dengan memastikan ketersediaan pupuk dengan harga

terjangkau (Ditjen Pertanian, 2023). Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud adalah Pupuk Urea, Pupuk NPK, Pupuk organik, Pupuk SP 36, dan Pupuk (Perpres No.6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi)

Regulasi pupuk bersubsidi dijabarkan dalam perpres dan permen. Misalnya, Permen Pertanian No.10/2022 menyatakan pupuk bersubsidi hanya dialokasikan bagi petani tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabe, bawang merah/putih), dan perkebunan rakyat (kopi, tebu, kakao), dengan luas lahan maksimal 2 ha per musim. Petani kecil ($\leq 0,5$ ha) diprioritaskan. Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi diorganisasi secara terstruktur: PT Pupuk Indonesia (Persero) ditugaskan mengelola pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi melalui jaringan produsen, distributor, dan pengecer di wilayah masing-masing. Prinsip yang diutamakan adalah efisiensi dan efektivitas, sehingga distribusi harus terkendali dan tepat sasaran (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, 2018)

2.2.4.1 Mekanisme Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian bahwa penyalur pupuk bersubsidi di lini IV kepada kelompok tani/petani adalah pengecer resmi yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku. Pengecer resmi wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV berdasarkan prinsip enam tepat kepada petani dan/atau kelompok tani. Instrumen yang digunakan pengecer resmi untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani adalah *print out* (data cetak) e-RDKK pupuk bersubsidi. Tugas dan tanggung jawab pengecer resmi terkait penyaluran pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut (Halim, 2023):

1. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimanya dari distributor kepada kelompok tani/petani;
2. Bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;
3. Bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani/petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya; serta
5. Menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku.

Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi yaitu (Ditjen Pertanian, 2023):

1. Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.
2. Alur distribusi dimulai dari produsen (Lini I dan Lini II), kemudian disalurkan kepada distributor sebagai penyalur di Lini III.
3. Distributor selanjutnya menyalurkan pupuk kepada pengecer resmi (penyalur di Lini IV) hingga akhirnya sampai kepada kelompok tani atau petani sebagai penerima akhir.
4. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk sesuai dengan wilayah kerja dan berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan.

5. Penyaluran pupuk bersubsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, seperti adanya pergeseran musim tanam, pengembangan kawasan, program khusus Kementerian Pertanian, maupun kondisi mendesak lainnya.
6. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui realokasi pupuk antar wilayah dan waktu distribusi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian mengenai alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET).
7. Pengecer resmi (Lini IV) wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang telah terdaftar dalam sistem e-Alokasi.
8. Harga pupuk bersubsidi yang dibayarkan oleh petani mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian.
9. Penjualan pupuk bersubsidi kepada petani dilakukan dalam kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.4.2 Indikator Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan riil petani secara berkelompok dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK) (Kementrian Pertanian, 2014). Berikut indikator efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi (Fatika et al., 2025):

1. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran menunjukkan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan

pemerintah, seperti luas lahan, jenis komoditas, dan status sebagai petani aktif. Data penerima biasanya tercantum dalam sistem e-RDKK, sehingga distribusi dapat dikontrol dan dipertanggungjawabkan. Ketidaktepatan sasaran, seperti adanya petani yang tidak berhak menerima atau petani yang berhak justru tidak mendapatkan pupuk, akan menyebabkan distorsi kebijakan dan menurunkan efektivitas program subsidi.

2. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu berkaitan dengan ketersediaan pupuk pada saat yang tepat, terutama menjelang dan selama musim tanam. Pupuk yang datang terlambat dapat mengganggu siklus budidaya tanaman dan berpotensi menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, distribusi harus disesuaikan dengan kalender tanam serta kondisi agroklimat setempat agar petani dapat menggunakan pupuk secara optimal sesuai fase pertumbuhan tanaman.

3. Ketepatan Jumlah

Ketepatan jumlah mengacu pada kesesuaian antara jumlah pupuk yang diterima petani dengan kebutuhan yang telah direncanakan dalam RDKK. Perencanaan ini didasarkan pada luas lahan dan kebutuhan spesifik tanaman. Kekurangan pupuk dapat menghambat pertumbuhan tanaman, sedangkan kelebihan pupuk berpotensi menimbulkan inefisiensi dan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, akurasi dalam penyaluran jumlah pupuk menjadi aspek penting dalam efektivitas distribusi.

4. Kemudahan Akses

Kemudahan akses mencakup aspek geografis dan administratif. Secara geografis, lokasi kios resmi harus mudah dijangkau oleh petani, sehingga

tidak menambah biaya transportasi yang tinggi. Secara administratif, prosedur pennebusan pupuk harus sederhana, tidak berbelit, serta didukung dengan sistem yang jelas seperti penggunaan kartu tani atau data e-RDKK. Akses yang mudah akan meningkatkan partisipasi petani dalam memanfaatkan pupuk bersubsidi.

5. Ketersediaan Pupuk

Ketersediaan pupuk menunjukkan bahwa stok pupuk bersubsidi selalu ada di tingkat pengecer resmi sesuai kebutuhan petani. Permasalahan kelangkaan pupuk sering menjadi kendala utama di lapangan, baik akibat keterlambatan distribusi, keterbatasan pasokan, maupun distribusi yang tidak merata. Ketersediaan yang stabil menjadi indikator penting karena secara langsung memengaruhi kelancaran kegiatan usahatani.

6. Transparansi Distribusi

Transparansi distribusi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai alokasi pupuk, harga eceran tertinggi (HET), serta mekanisme penyaluran. Informasi yang terbuka memungkinkan petani mengetahui hak dan kewajibannya, serta mengurangi peluang terjadinya praktik penyimpangan seperti penimbunan, penjualan di atas HET, atau distribusi tidak merata. Transparansi juga meningkatkan kepercayaan petani terhadap sistem distribusi yang dijalankan.

7. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian mencakup kegiatan monitoring, evaluasi, serta penegakan aturan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan sesuai

ketentuan, sedangkan pengendalian dilakukan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran, seperti penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Sistem pengawasan yang baik akan menjaga integritas distribusi dan mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan.

2.2.5 Skala Likert

Skala *Likert* adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala ini terdiri dari serangkaian pernyataan yang harus dinilai oleh responden berdasarkan tingkat persetujuan mereka, biasanya pada skala dari “sangat setuju” hingga “sangat tidak setuju”. Skala *Likert* memberikan data ordinal, yang berarti bahwa jarak antara nilai-nilai pada skala tersebut tidak sama, meskipun sering dianggap demikian untuk kemudahan analisis (Sugiyono, 2024)

Skala Likert adalah metode pengukuran yang digunakan dalam survei untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi responden terhadap suatu pernyataan. Responden diminta untuk menunjukkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap pernyataan tersebut menggunakan rentang tanggapan yang sudah ditentukan. Skala Likert umumnya terdiri dari 5 tingkatan, dengan opsi seperti (Ghozali, 2018):

Tabel 1. Skala Pengukuran Penelitian

No	Pernyataan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

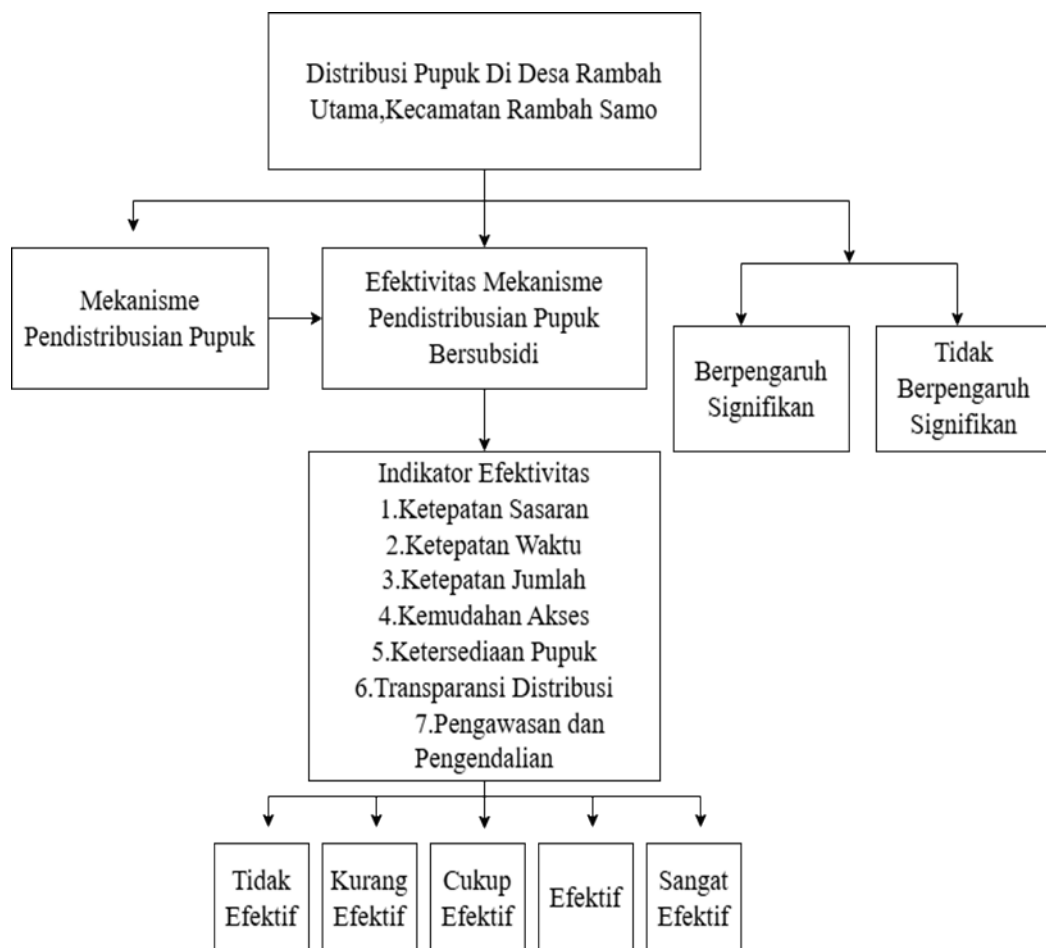
Sumber: Ghozali (2018)

Setiap tanggapan diberi nilai numerik, misalnya dari 1 hingga 5, yang kemudian dapat dianalisis secara statistik untuk memahami pola atau

kecenderungan dari jawaban responden. Skala ini sering digunakan karena memungkinkan penilaian yang lebih kaya dan detail dibandingkan pertanyaan pilihan biner (Ya/Tidak).

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah struktur berpikir yang digunakan untuk analisis terhadap suatu topik atau masalah. Kerangka pemikiran adalah struktur berpikir yang digunakan untuk analisis terhadap suatu topik atau masalah. Kerangka berpikir ini menggambarkan tujuan penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2024) menjelaskan bahwa hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Rambah Utama dalam kategori Efektif (H_a)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Desa ini dipilih karena Desa Rambah Utama memiliki karakteristik petani yang beragam, luas lahan sawah yang cukup luas, serta mekanisme distribusi pupuk yang melibatkan berbagai pihak seperti kelompok tani, kios resmi, dan penyuluh pertanian. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama dua bulan, yaitu mulai dari bulan Januari sampai Mei 2026.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode survei dan wawancara, dan dokumentasi pada petani padi di Desa Rambah Utama:

1. Survei

Metode survei dilakukan dengan mendatangi langsung responden di lokasi penelitian untuk memastikan kuesioner diisi dengan benar serta memperoleh gambaran kondisi nyata di lapangan. Peneliti melakukan observasi terhadap proses distribusi pupuk, seperti lokasi kios resmi, ketersediaan pupuk, dan aktivitas petani dalam menebus pupuk bersubsidi.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data yang diberikan kepada responden, yaitu petani penerima pupuk bersubsidi di Desa Rambah Utama.

3. Wawancara

Metode wawancara dilakukan secara langsung kepada informan. Wawancara

bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai mekanisme penyaluran pupuk.

4. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti data e-RDKK, laporan distribusi pupuk, peraturan terkait, serta arsip atau catatan yang relevan. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data primer serta sebagai bahan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh dari kuesioner, survei, dan wawancara.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani yang tergabung dalam kelompok tani di Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, yang berjumlah 417 orang berdasarkan data dari BPP Rambah Samo tahun 2025. Populasi ini tersebar dalam 17 kelompok tani dengan jumlah anggota yang bervariasi pada setiap kelompok, seperti Karya Tama II dengan 48 anggota, Tani Subur 44 anggota, hingga Widuri I dengan 9 anggota. Data populasi ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.

Tabel 2. Data Kelompok Tani Desa Rambah Utama

No.	Nama Poktan	Ketua Poktan	Jumlah Anggota
1	Widuri I	Liling Astuti	9
2	Tani Berkarya	Samidi	18
3	Karet	Ujang Saepullah	0
4	Kamboja III	Sebastian.B	25
5	Utama Cemerlang	April Sriyanto	21
6	Karya Tama I	Riadi	27
7	Karya Tama II	Sukirman	48
8	Tani Subur	Kasiyo	44
9	Maju Lestari	Nur Amarudin	22
10	Sri Rezeki	Yohanes A.W	25
11	Karya Mandiri	Istijo	21
12	Karya Mulya	Abd.Mukalam	35

No.	Nama Poktan	Ketua Poktan	Jumlah Anggota
13	Margo Subur	Supriadi	37
14	Karya Jaya	Jarno	16
15	Satu Hati	Suyud	29
16	Rukun Sentosa	Muryanto	21
17	Tunas Harapan	Sunendi	19
TOTAL			417

Sumber: BPP Rambah Samo, 2025

Seluruh anggota kelompok tani tersebut merupakan populasi yang relevan karena merupakan penerima pupuk bersubsidi dan terlibat langsung dalam mekanisme distribusi. Populasi ini dianggap representatif untuk mengkaji efektivitas mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Rambah Utama.

3.3.2 Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *proportional random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak dengan mempertimbangkan proporsi jumlah anggota pada masing-masing kelompok tani. Teknik ini dipilih agar setiap kelompok tani memiliki peluang yang seimbang untuk menjadi responden sesuai dengan jumlah anggotanya (Sugiyono, 2024). Selanjutnya, penentuan responden dilakukan secara acak sederhana di dalam masing-masing kelompok tani, sehingga data yang diperoleh dapat mewakili kondisi populasi secara objektif dan akurat. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus *slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

n = Sampel

N = Populasi

e = Interval Keyakinan (10%)

Berdasarkan perhitungan rumus *slovin* maka diperoleh jumlah sampel penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{417}{1 + 417 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{417}{5,17} = 81 \text{ sampel}$$

3.4 Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, untuk menjawab tujuan ke-1 penelitian ini menggunakan teknik wawancara, sedangkan untuk menjawab tujuan ke-2 penelitian ini menggunakan analisis skala interval untuk mengukur tingkat efektivitas mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan indikator ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan waktu, dan ketepatan harga.

3.4.1 Pengukuran Skala *Likert*

Pada penelitian kuantitatif, pengukuran pendapat responden terhadap suatu fenomena biasanya dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Skala ini menunjukkan peneliti mengubah jawaban responden menjadi data kuantitatif yang dapat diolah lebih lanjut secara statistik (Sujarweni, 2024). Pada penelitian ini, skala Likert digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi dan kondisi produksi padi petani. Pengukuran skala likert dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Skor Pengukuran Skala Likert

No	Kategori	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Cukup Setuju (TS)	3
4	Kurang Setuju	2
5	Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Kriyantono (2024)

Setelah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan skala likert, maka selanjutnya dilakukan Analisis skala interval kepuasan untuk mengetahui tingkat efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi dan kondisi produksi padi petani Desa Rambah Utama. Teknik ini dilakukan dengan cara menghitung nilai

rata-rata dari jawaban responden berdasarkan skala Likert, kemudian hasilnya diinterpretasikan ke dalam kategori interval tertentu. Rumus menentukan rentang interval yaitu (Simamora, 2018):

$$RS = \frac{m - n}{b}$$

Rs = Rentang skor

M = Skor tertinggi

N = Skor terendah

B = bobot

$$RS = \frac{5 - 1}{5}$$

$$RS = 0,8$$

Hasil dari perhitungan rentang nilai tersebut dapat diklasifikasikan menjadi norma keputusan sebagai berikut:

Tabel 4. Skor Pengukuran Skala Likert dan Interval

No	Rentang Skor Rata-rata	Kategori Efektivitas
1	4,21 – 5,00	Sangat Efektif
2	3,41 – 4,20	Efektif
3	2,61 – 4,40	Cukup Efektif
4	1,81 – 2,60	Kurang Efektif
5	1,00 – 1,80	Tidak Efektif

Tabel skor pengukuran skala Likert dan interval digunakan sebagai acuan dalam menginterpretasikan nilai rata-rata jawaban responden terhadap variabel yang diteliti, khususnya dalam menilai tingkat efektivitas distribusi pupuk bersubsidi. Rentang skor dibagi menjadi lima kategori, yaitu sangat efektif (4,21–5,00), efektif (3,41–4,20), cukup efektif, kurang efektif, hingga tidak efektif, sehingga memudahkan peneliti dalam mengklasifikasikan hasil analisis data secara sistematis dan terukur. Berdasarkan interval ini, setiap nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil kuesioner dapat diterjemahkan secara objektif ke dalam kategori efektivitas, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi di lokasi penelitian.

3.4.2 Uji Instrumen Penelitian

3.4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian (kuisioner) benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada penelitian kuantitatif, validitas instrumen menjadi penting agar data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Tujuan utama uji validitas adalah memastikan setiap butir pernyataan dalam kuisioner relevan dengan indikator penelitian serta dapat dipahami oleh responden secara konsisten (Sugiyono, 2024). Rumus uji validitas yaitu (Sugiyono, 2024):

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2] [N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Pengujian terhadap validitas instrumen penelitian menggunakan *software* SPSS V.22. Uji validitas dilakukan pada responden sebanyak 67 anggota BUM Desa Mekar Sari, dengan ketentuan jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2024).

3.4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang sama. Artinya, jika instrumen tersebut digunakan berulang kali pada kondisi yang sama, hasilnya akan relatif stabil. Reliabilitas menjadi penting agar data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya dan tidak berubah hanya karena faktor kebetulan. Rumus uji reliabilitas yaitu (Sugiyono, 2024):

$$r = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

r = koefisien reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah ragam butir (total varians butir)

σ_t^2 = ragam total (total varians)

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan didasarkan pada pedoman Sujarweni (2024) yang menetapkan bahwa suatu pernyataan dapat dikatakan reliabel jika koefisien *Cronbach Alpha* melebihi 0,60. Sebaliknya, ketika koefisien *Cronbach Alpha* turun di bawah 0,60, pertanyaan terkait dianggap tidak dapat diandalkan. Rumus *Cronbach Alpha* dimanfaatkan untuk menentukan keandalan data, dan perangkat lunak SPSS 22 dimanfaatkan untuk tujuan ini..

3.5 Definisi Operasional

Ada pun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Efektivitas yaitu tingkat keberhasilan distribusi pupuk bersubsidi yang dirasakan oleh petani padi di Desa Rambah Utama berdasarkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan melalui skor rata-rata skala Likert.
2. Mekanisme adalah prosedur pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi yang dijalankan oleh petani padi di Desa Rambah Utama mulai dari perencanaan (e-RDKK) hingga penebusan di kios resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Distribusi merupakan proses penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen hingga diterima oleh petani padi di Desa Rambah Utama melalui jalur resmi (Lini I–V).
4. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang diterima oleh petani padi di Desa Rambah Utama dengan harga sesuai HET dan alokasi yang ditetapkan pemerintah melalui sistem e-RDKK.

5. Ketepatan sasaran yaitu kesesuaian penerimaan pupuk bersubsidi oleh petani padi di Desa Rambah Utama yang terdaftar dalam e-RDKK sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
6. Ketepatan waktu adalah ketersediaan pupuk bersubsidi yang diterima oleh petani padi di Desa Rambah Utama sesuai dengan jadwal musim tanam.
7. Ketepatan jumlah merupakan kesesuaian jumlah pupuk yang diterima oleh petani padi di Desa Rambah Utama dengan alokasi yang tercantum dalam e-RDKK.
8. Kemudahan akses yaitu tingkat kemudahan petani padi di Desa Rambah Utama dalam memperoleh pupuk bersubsidi dari segi jarak kios dan prosedur pennebusan.
9. Ketersediaan pupuk adalah kondisi ketersediaan stok pupuk bersubsidi di kios resmi yang dapat diakses oleh petani padi di Desa Rambah Utama saat dibutuhkan.
10. Transparansi distribusi merupakan tingkat keterbukaan informasi yang diterima oleh petani padi di Desa Rambah Utama terkait alokasi, HET, dan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi.
11. Pengawasan dan pengendalian yaitu tingkat pelaksanaan monitoring dan penegakan aturan distribusi pupuk bersubsidi yang dirasakan oleh petani padi di Desa Rambah Utama.
12. Skala Likert adalah alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai sikap, pendapat, dan persepsi petani terhadap mekanisme pendistribusian pupuk subsidi.